



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Renja Inspektorat merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan sasaran strategis arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Inspektorat untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja Inspektorat merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Inspektorat pada tahun 2023 merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Inspektorat dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Inspektorat mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

1. Program dalam Renja sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau pada tahun berkenan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja Inspektorat selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) serta dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Dalam rangka menangani isu strategis ke-7 Kabupaten Malinau tahun 2022 yakni **“Belum primanya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”**, serta tujuan Inspektorat Kabupaten Malinau yakni “Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.”, maka Inspektorat Kabupaten Malinau menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rancangan Awal RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023. Renja Inspektorat yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Inspektorat.

### 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, dan Peraturan;
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau.
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Malinau;
12. Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050.4/56/Hukum Tanggal 4 Maret 2022 tentang pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 adalah sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sasaran yang ingin di capai pada tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau.

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yaitu :

- a. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022.
- b. Sebagai pedoman atau dasar penyusunan Perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2023.
- c. Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Kabupaten Malinau selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat tahun 2023 adalah :

- a. Untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PAS) Tahun 2023.
- b. Menjabarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Malinau ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023.
- c. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Malinau dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Malinau.
- d. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah :

#### **I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **III. TUJUAN DAN SASARAN, INSPEKTORAT**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **IV. RENCANA KINERJA TAHUN 2023**



# RENJA TAHUN 2023

INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

## V. PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2021

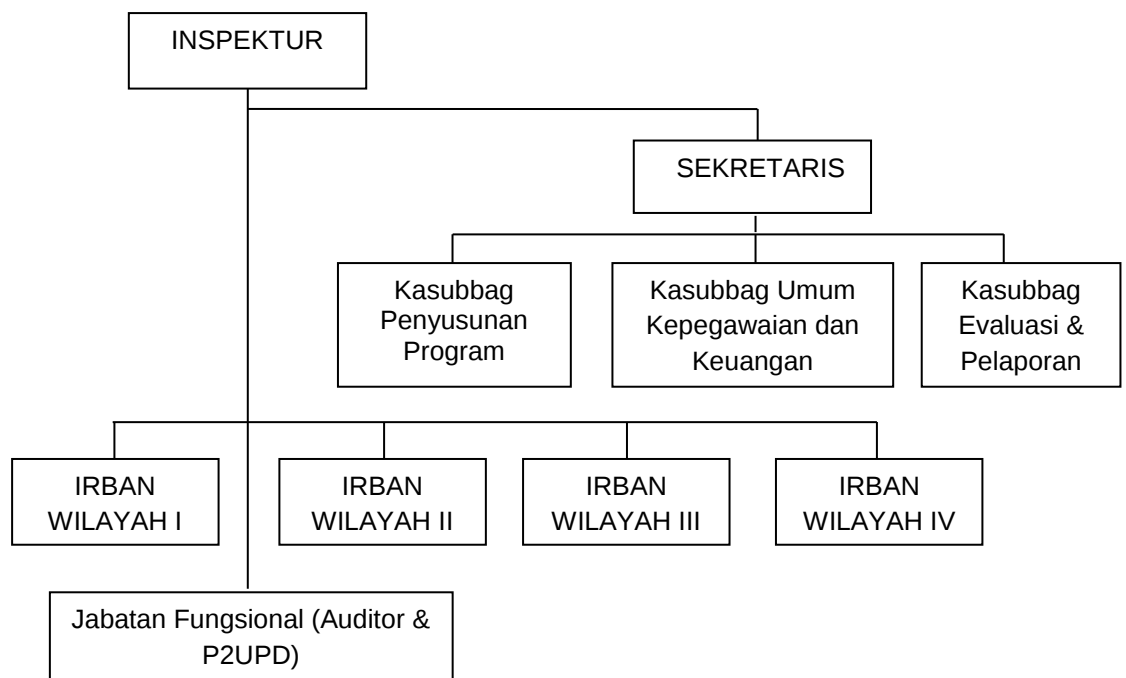
#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2021 & CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT

Evaluasi realisasi capaian target diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai dengan Renstra. Dengan kata lain capaian dilakukan untuk dapat mengetahui program/kegiatan mana yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dan sebaliknya, juga dapat mengetahui program/kegiatan mana yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

##### 2.1.1 Pengolahan Data dan Informasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

##### Struktur Organisasi Inspektorat





# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

### Peraturan yang terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat

- Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau
- Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Malinau.

### RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023 yang terkait dengan Inspektorat

Inspektorat melaksanakan visi dan misi Bupati Malinau yakni :

Visi Bupati Malinau adalah **“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional”**

Misi Bupati Malinau adalah :

- Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul
- Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal
- Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
- 4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan**

Inspektorat Kabupaten Malinau melaksanakan Misi ke-4 Bupati Malinau, dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik (Good Governance).

Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023 ke-2

| No | Sasaran                                                    | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| 2  | Terselenggaranya Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN | Opini BPK                 | Poin   | WTP    |

Prioritas pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2023 yang ke-6 :

- Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik dengan Program Prioritas :
  - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  - Program Informasi dan Komunikasi Publik
  - Program Aplikasi Informatika
  - 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

- 5) Program Kepegawaian Daerah
- 6) Program Penyelenggaraan Pengawasan**
- 7) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**

Program ke-4, ke-6, dan ke-7 dilaksanakan oleh Inspektorat.

A. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 pada Lampiran Bab III yaitu Fokus pembinaan dan pengawasan :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan.
  - b. Pemeriksaan kinerja
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
  - a. Reviu dokumen perencanaan
  - b. Rancir RKPD
  - c. Rancangan KUA PPAS
  - d. RKA SKPD
  - e. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah
    - a) Akuntabilitas pendapatan daerah
    - b) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah
    - c) Pengelolaan pembiayaan daerah
    - d) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan
    - e) Pengelolaan barang milik daerah
  - f. Reviu Laporan Keuangan
    - a) Laporan Keuangan
  - g. Kegiatan Pengawasan Lainnya
    - a) Probity audit
    - b) Laporan kinerja (reviu)
    - c) Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (reviu)
    - d) Perhitungan kerugian keuangan daerah (pdtt)
    - e) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (evaluasi)
    - f) Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan)
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas Pengendalian gratifikasi
  - a. Pelaksanaan survei penilaian integritas



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

- b. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)
  - c. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi
  - d. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategis nasional pencegahan korupsi
  - e. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK
  - f. Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar
  - g. Pemeriksaan investigatif
  - h. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat
  - i. Monev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP
4. Peningkatan KAPIP
- a. KAPIP level 3
  - b. Maturitas SPIP
  - c. Penerapan manajemen risiko
  - d. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 jam per tahun
  - e.

### 2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat

#### 1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Secara umum capaian kinerja program/kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2021 dapat disampaikan sangat baik, hal ini dilihat dari realisasi anggaran dan fisik tahun 2021 terdapat 11 (sebelas) kegiatan mencapai 100% yaitu :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan target 12 Aparatur dan terlaksana 26 Aparatur sehingga terealisasi 216,67%
- b. Pengawasan Desa dengan target 17 Obrik dan dilaksanakan 18 Obrik (43 desa) atau terealisasi 105,88%
- c. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Target 2 OPD dan terlaksana 2 OPD sehingga terealisasi 100,00 %
- d. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Target 14 OPD dan terlaksana 14 OPD sehingga terealisasi 100,00 %
- e. Kerjasama Pengawasan Internal Target 3 Laporan dan terlaksana 3 laporan sehingga terealisasi 100%.



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

- f. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Target 3 PDTT dan terlaksana 3 PDTT sehingga terealisasi 100,00 %
- g. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Target 10 OPD dan terlaksana 10 OPD sehingga 100,00 %
- h. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Target 54 OPD dan terlaksana 54 OPD sehingga terealisasi 100,00%
- i. Reviu Laporan Kinerja (Reviu LkjiP, Reviu LPPD, Opini Bendara, Reviu Penyerapan Anggaran, dan Evaluasi SAKIP OPD) Target 4 Dokumen dan terlaksana 8 Laporan sehingga terealisasi 200,00%
- j. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan target 1 laporan saber pungi terealisasi 1 Laporan atau 100,00%
- k. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya target 18 unit terealisasi 18 unit atau 100%
- l. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 550 lembar dan terealisasi 550 lembar surat atau 100%
- m. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 11 (sebelas) unit dan terealisasi 11 (sebelas) unit sarana prasarana yang terpelihara atau 100%
- n. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 26 (dua puluh enam) jenis ATK dan yang terealisasi 26 (dua puluh enam) perlengkapan kantor yang tersedia atau 100%
- o. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target 71.000 lembar dan yang terealisasi 71.000 lembar atau 100%

### **2. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

- a. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan target 100 LHE untuk tahun 2021 terealisasi 43 LHE atau 43,00%
- b. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan target 4 Kasus dan terealisasi 2 Kasus atau 50,00%
- c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Monev Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi, Survei Penilaian Integritas Pembangunan Zona Integritas,) dengan target 2 laporan terealisasi 1 Laporan atau 50,00%



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

- d. Reviu Laporan Keuangan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 (Reviu LKPD, Reviu DAK dan Reviu RKA) dengan target 3 (tiga) laporan namun teralisasi 2 (dua) Kegiatan reviu atau 66,66%
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 5 Lembaga+5 Kecamatan, teralisasi 5 lembaga+4 Kecamatan, sehingga capaiannya 90,00%
- f. Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian dengan target 35 Fungsional tertentu dan teralisasi 6 fungsional tertentu atau 17,14%
- g. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tidak dilaksanakan karena dana tersebut digunakan untuk *refocussing*, (pandemi Covid-19)
- h. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tidak dilaksanakan karena dana tersebut digunakan untuk *refocussing*, (pandemi Covid-19)
- i. Pengadaan Aset Tak Berwujud tidak dilaksanakan karena dana tersebut digunakan untuk *refocussing*, (pandemi Covid-19)
- j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tidak dilaksanakan karena dana tersebut digunakan untuk *refocussing*, (pandemi Covid-19)

### 3. Faktor-Faktor Penyebab tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Beberapa Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yang telah selesai dilaksanakan sebagai berikut :

1. Komitmen yang kuat dari pimpinan pelaksana/ pegawai untuk mencapai target yang telah ditentukan;
2. Dukungan partisipasi serta sikap kooperatif OPD dan pihak terkait;

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia
2. Kegiatan terkait dengan pihak eksternal sehingga harus menyesuaikan jadwal eksternal tersebut.



#### **4. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Inspektorat**

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau 2016-2021, secara umum seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja Rata-rata 90,42%. Berdasarkan target capaian program pada Renstra tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 secara umum mampu memenuhi target capaian program pada Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau, ini menjadi awal yang baik untuk melangkah di tahun yang akan datang.

#### **5. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Beberapa kebijakan/tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian program/kegiatan :

- 1) Melaksanakan perencanaan yang optimal dengan memperhitungkan anggaran, waktu, dan SDM yang tersedia, serta jadwal pihak eksternal terkait;
- 2) Melaksanakan kegiatan secara efektif, efisien, dan ekonomis.
- 3) Meningkatkan kualitas APIP dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Untuk hasil evaluasi renja inspektorat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel T.C 29 (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah & Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Malinau) terlampir.

Penjelasan atas tabel T.C 29 capaian kinerja Inspektorat tahun 2021 per kegiatan adalah sebagai berikut:

#### **PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN**

##### **1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Target 2 OPD terealisasi 2 OPD (100%) yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Bappeda dan Litbang.



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

### 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Target 14 OPD terealisasi 14 OPD (100%) yaitu Dinas Perikanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

### 3. Reviu Laporan Kinerja

Target 4 laporan terealisasi 8 laporan (200%) yaitu Reviu LKjIP Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2020, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020, Reviu Perubahan Rencana Kerja BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas, Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Evaluasi SAKIP OPD, Reviu Perubahan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2021, Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ per triwulan.

### 4. Reviu Laporan Keuangan

Target 3 laporan terealisasi 2 laporan (66,66%) yaitu Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK).

### 5. Pengawasan Desa

Target 17 obrik terealisasi 18 obrik (105,88%) yaitu

- a. Kantor Camat Malinau Barat dan Desa Tanjung Lapang
- b. Kantor Camat Malinau Utara dan Desa Malinau Seberang
- c. Kantor Camat Malinau Kota dan Desa Malinau Kota
- d. Kantor Camat Mentarang dan Desa Pulau Sapi
- e. Desa Punan Bengalun, Sesua, Sempayang di Kecamatan Malinau Barat
- f. Desa Respen Tubu, Desa Lubak Manis, dan Desa Semenggaris di Kecamatan Malinau Utara
- g. Desa Kuala Lapang, Desa Taras di Kecamatan Malinau Barat
- h. Desa Pelita Kanaan, Desa Malinau Hulu, dan Desa Malinau Hilir di Kecamatan Malinau Kota



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

- i. Desa Batu Lidung, Desa Tanjung Keranjang di Kecamatan Malinau Kota
  - j. Desa Kaliamok, Luso, Sembuak Warod, Kelapis di Kecamatan Malinau Utara
  - k. Desa Long Billa, Long Kenipe, Sentaban di Kecamatan Malinau Barat
  - l. Desa Mentarang Baru, Lidung Kemenci, Long Bisai di Kecamatan Malinau Barat
  - m. Desa Mentarang Baru, Lidung Kemenci, Long Bisai di Kecamatan Malinau Barat
  - n. Desa Putat, Belayan, Seruyung, Salap di Kecamatan Malinau Utara
  - o. Desa Setulang, Gong Solok, Punan Gong Solok, Long Adiu, Punan Adiu di Kecamatan Malinau Barat
  - p. Desa Temalang, Long Liku, Long Gafid di Kecamatan Mentarang
  - q. Kantor Camat Malinau Selatan Hilir dan Desa Setarap, Punan Setarap, Batu Kajang
  - r. Desa Malinau Hilir, Kecamatan malinau kota
6. Kerjasama Pengawasan Internal
- Target 3 laporan terealisasi 3 laporan (100%) yaitu Inspektorat melakukan pendampingan pemeriksaan kepada BPK sebanyak 3 kali.
7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- Target 100 LHE terealisasi 43 LHE (43%) yaitu monev terhadap :
- a. Temuan BPK Pada Kantor Kepala Desa Lubak Manis dan Seruyung
  - b. Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Salap Putat Belayan Sesua Sempayang Taras Kenipe Sentaban, Long Bila, Harapan Maju, Paking, Kuala Lapang, Malinau Kota, Pelita Kanaan, Tanjung Keranjang, Batu Lidung, Tanjung Keranjang, Malinau Hilir, Lubak Manis, Semenggaris, Respen Tubu, Kantor Camat Malinau Kota
  - c. Temuan Inspektorat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kesbang Pol, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, BPKD, Sekretariat DPRD, Dinas Perhubungan, RSUD, Dinas Pertanian, Bagian Kesejahteraan Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Target 4 kasus terealisasi 2 kasus (50%).



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

9. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu  
Target 3 PDTT terealisasi 3 PDTT (100%)

### PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI

1. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan  
Target 1 laporan saber pungli terealisasi 1 laporan saber pungli (100%).
2. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah  
Target 10 OPD terealisasi 10 OPD (100%) yaitu Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat, Dinas Ketahanan Pangan, Bagian Perekonomian, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi  
Target 54 OPD terealisasi 54 OPD (100%). Kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi sudah dilaksanakan namun nilai untuk Pemerintah Kabupaten Malinau masih menunggu dari Kementerian PAN RB.
4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas  
Target 2 laporan terealisasi 1 laporan (50%). Nilai MCP per 31 Desember 2021 (13,19%).

### PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 35 (tiga puluh lima) orang ASN dan terealisasi 35 (tiga puluh lima) orang ASN yang menerima gaji dan tunjangan atau 100%
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tidak dilaksanakan karena dana tersebut digunakan untuk *refocussing*, (pandemi Covid-19)
- c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan target 35 (tiga puluh lima) fungsional tertentu dan terealisasi 6 (enam) Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD yang dapat dinilai atau 17,14%
- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan target 12 (dua belas) APiP dan terealisasi 26 (dua puluh enam) APiP atau 166,66%
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 26 (dua puluh enam) jenis ATK dan yang terealisasi 26 (dua puluh enam) perlengkapan kantor yang tersedia atau 100%



## RENJA TAHUN 2023

INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

- f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan target 71.000 lembar dan yang terealisasi 71.000 lembar atau 100%
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 5 kecamatan & 5 lembaga dan yang terelisasi 4 kecamatan & 5 lembaga atau 90%
- h. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 18 (delapan belas) unit dan yang terealisasi 18 (delapan belas) atau 100%
- i. Pengadaan Aset Tak Berwujud tidak dilaksanakan karena dana tersebut digunakan untuk *refocussing*, (pandemi Covid-19)
- j. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 550 lembar dan terealisasi 550 lembar surat atau 100%
- k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tidak dilaksanakan karena dana tersebut digunakan untuk *refocussing*, (pandemi Covid-19)
- l. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 11 (sebelas) unit dan terealisasi 11 (sebelas) unit sarana prasarana yang terpelihara atau 100%



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

### 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Analisis Kinerja Inspektorat Tahun 2021 sebagai bahan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.30.

#### Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Malinau

| Kode | Indikator Kinerja Utama                                  | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Inspektorat |            |            |            | Realisasi Capaian |            |            | Proyeksi   |            | Catatan Penting |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
|      |                                                          |                      |     | Tahun 2019                 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |                 |
| (1)  | (2)                                                      | (3)                  | (4) | (5)                        | (6)        | (6)        | (7)        | (11)              | (9)        | (10)       | (10)       | (11)       | (12)            |
| 1    | Persentase temuan yang ditindaklanjuti                   | -                    |     | 80%                        | 85%        | 90%        | 90%        | 86,11%            | 86,36%     | 90,42%     | 90%        |            |                 |
| 2    | Nilai SPIP Kabupaten Malinau                             | -                    |     | 3,0                        | 3,1        | 3,2        | 3,2        | 3,03              | 3,03       | 3,2        | 3,2        |            |                 |
| 3    | Persentase dokumen perencanaan daerah & OPD yang direviu | -                    |     | 80%                        | 90%        | 100%       | 100%       | 100%              | 100%       | 100%       | 100%       |            |                 |
|      |                                                          |                      |     |                            |            |            |            |                   |            |            |            |            |                 |

Sumber : Sub Bagian Penyusunan Program Inspektorat 2021



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS & FUNGSI INSPEKTORAT

Pada RKPD Kabupaten Malinau tahun 2023 terdapat isu strategis Kabupaten Malinau pada tahun 2023 yang terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat (Isu strategis ke-7) yaitu **Belum primanya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**. Terkait isu srategis Kabupaten Malinau tersebut maka Inspektorat juga menghadapi 5 isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kinerja pada tahun 2023 yaitu :

1. Belum optimalnya pengawasan terhadap OPD dan Desa
2. Belum optimalnya reviu terhadap dokumen keuangan dan kinerja
3. Belum optimalnya monitoring tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan
4. Belum optimalnya pendampingan dan asistensi terkait maturitas SPIP, reformasi birokrasi, survei integritas dan monev pemberantasan korupsi
5. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan bagi APIP serta pengadaan barang dan jasa untuk menunjang pengawasan.

### 2.4 REVIEW TERHADAP RKPD

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Malinau tahun 2023 serta membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJP Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 dengan berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Inspektorat.

RKPD Kabuapten Malinau dapat dilihat pada tabel T-C.31 (Review Terhadap RKPD 2023 Kabupaten Malinau) tabel terlampir.

### 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2023 merupakan kegiatan inisiatif Inspektorat. Hal ini karena pada Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Malinau untuk kegiatan tahun 2023 tidak terdapat usulan kegiatan pada Inspektorat serta musrenbang masyarakat juga tidak ada yang mengusulkan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Malinau.



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

#### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat adalah Permendagri 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021, oleh karena itu Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat untuk Tahun 2023 merupakan kegiatan yang diamanatkan oleh peraturan tersebut.

Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau tahun 2023 juga selaras dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional yang juga merupakan Prioritas Nasional dalam rancangan RKP tahun 2023 ke-7 yaitu **“Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”**.

#### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

Selaras dengan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023 ke-6 seperti yang tercatat pada RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023 yaitu **“meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara bersih, bertanggungjawab, efisien, efektif, tertib, dan aman”** dengan indikator sasaran yaitu:

- a. Nilai SAKIP
- b. Nilai LPPD
- c. Opini BPK
- d. Reformasi Birokrasi

Maka Inspektorat Kabupaten menetapkan tujuan dan sasaran :

1. Tujuan Strategis Inspektorat
  - 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
2. Sasaran
  - 1) Meningkatnya pengawasan keuangan dan kinerja
  - 2) Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD

#### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Inspektorat Kabupaten Malinau melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan pada tahun 2023 selaras dengan Prioritas Pembangunan Malinau tahun 2023 ke-6 yakni **“Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik”**.



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

- A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - 3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
    - 4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 9. Pengadaan Aset Tak Berwujud
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
  - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    - 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - 3. Reviu Laporan Kinerja
    - 4. Reviu Laporan Keuangan
    - 5. Pengawasan Desa
    - 6. Kerjasama Pengawasan Internal
    - 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
    - 8. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
    - 9. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

- C. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
  - a. Pendampingan dan Asistensi
    - 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
    - 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
    - 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
    - 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
  - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
    - 1. Perumusan Kebijakan Teknis dengan Bidang Fasilitas Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas Kabupaten Malinau untuk Tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam tabel T.C 33 terlampir :



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

### BAB IV

#### RENCANA KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2022

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Malinau tahun 2022 maka diperlukan dana belanja yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022 sebesar **Rp. 12.714.850.774**.

Inspektorat Kabupaten Malinau menetapkan 3 (tiga) program yang menjadi dasar tujuan yang diwujudkan dalam 9 (sembilan) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan**

| Kode     | Program/ Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja Kegiatan                                                          | Rencana Tahun 2022 |                        |                |             | Catatan |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|---------|
|          |                                                                   |                                                                                     | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |         |
| <b>A</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b> | Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan penunjang                             |                    | 100%                   |                |             |         |
| 1        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan gaji                                  |                    | 100%                   |                |             |         |
| a        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Kabupaten Malinau  | 34 Orang/Bulan         | 8.214.850.774  | APBD        |         |
| 2        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pelaksanaan tugas                     |                    | 100%                   |                |             |         |
| a        | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | Kabupaten Malinau  | 36 Paket               | 20.000.000     | APBD        |         |
| b        | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | Kabupaten Malinau  | 15 Dokumen             | 25.000.000     | APBD        |         |
| c        | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kabupaten Malinau  | 36 orang               | 250.000.000    | APBD        |         |
| 3        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan sarana dan prasarana                  |                    | 100%                   |                |             |         |
| a        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | Kabupaten Malinau  | 26 Paket               | 100.000.000    | APBD        |         |
| b        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | Kabupaten Malinau  | 71000 Paket            | 30.000.000     | APBD        |         |



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

|          |                                                                                                                    |                                                                                                                              |                   |               |               |      |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|--|
| c        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                          | Kabupaten Malinau | 21 Laporan    | 500.000.000   | APBD |  |
| 4        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan barang                                                                         |                   | 100%          |               |      |  |
| a        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                      | Kabupaten Malinau | 10 unit       | 90.000.000    | APBD |  |
| b        | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                        | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                                                                | Kabupaten Malinau | 1 unit        | 50.000.000    | APBD |  |
| 5        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan surat                                                                          |                   | 100%          |               |      |  |
| a        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                | Kabupaten Malinau | 1 Laporan     | 5.000.000     | APBD |  |
| 6        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pemeliharaan                                                                   |                   | 100%          |               |      |  |
| a        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                       | Kabupaten Malinau | 14 unit       | 40.000.000    | APBD |  |
| b        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                           | Kabupaten Malinau | 23 unit       | 10.000.000    | APBD |  |
| <b>B</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>                                                                          | Persentase pengawasan terhadap objek pemeriksaan                                                                             |                   | 100%          |               |      |  |
| 1        | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    |                   | 100%          |               |      |  |
| a        | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | Kabupaten Malinau | 3 Laporan     | 90.000.000    | APBD |  |
| b        | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Kabupaten Malinau | 35 Laporan    | 400.000.000   | APBD |  |
| c        | Reviu Laporan Kinerja                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Kabupaten Malinau | 5 laporan     | 410.000.000   | APBD |  |
| d        | Reviu Laporan Keuangan                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         | Kabupaten Malinau | 3 laporan     | 150.000.000   | APBD |  |
| e        | Pengawasan Desa                                                                                                    | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        | Kabupaten Malinau | 39 laporan    | 1.100.000.000 | APBD |  |
| f        | Kerjasama Pengawasan Internal                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Kabupaten Malinau | 3 Kesepakatan | 25.000.000    | APBD |  |



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

|              |                                                                                                         |                                                                                                                  |                   |                     |                       |      |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------|--|
| g            | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                        | Kabupaten Malinau | 50 Dokumen          | 160.000.000           | APBD |  |
| 2            | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | Persentase kasus terlapor yang diperiksa                                                                         |                   | 100%                |                       |      |  |
| a            | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                | Kabupaten Malinau | 3 Laporan           | 70.000.000            | APBD |  |
| b            | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                           | Kabupaten Malinau | 3 laporan           | 100.000.000           | APBD |  |
|              |                                                                                                         |                                                                                                                  |                   |                     |                       |      |  |
| C            | <b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi</b>                                         | Persentase pendampingan yang dilaksanakan                                                                        |                   | 100%                |                       |      |  |
| 1            | Pendampingan dan Asistensi                                                                              | Persentase OPD yang dinilai                                                                                      |                   | 100%                |                       |      |  |
| a            | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                     | Kabupaten Malinau | 10 Perangkat Daerah | 120.000.000           | APBD |  |
| b            | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi    | Kabupaten Malinau | 54 perangkat daerah | 50.000.000            | APBD |  |
| c            | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | <i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i> | Kabupaten Malinau | 1 Kegiatan          | 35.000.000            | APBD |  |
| d            | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas               | Kabupaten Malinau | 3 perangkat daerah  | 370.000.000           | APBD |  |
| e            | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                              | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun                                 | Kabupaten Malinau | 1 Rekomendasi       | 300.000.000           |      |  |
| <b>Total</b> |                                                                                                         |                                                                                                                  |                   |                     | <b>12.714.850.774</b> |      |  |



# RENJA TAHUN 2023

## INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

### BAB V

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2023 memuat pelaksanaan 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan nilai Rp12.714.850.774,00 yang menjadi skala prioritas pembangunan tahun 2023. Renja Inspektorat 2023 disusun dengan memperhatikan :

- Tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 yakni membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- Kegiatan *Mandatori* pengawasan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020.
- Peran Inspektorat seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yakni *Assurance, Early Warning System, Improving Good Government, Consulting*.
- RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023 terutama selaras dengan Prioritas Pembangunan Malinau tahun 2023 ke-6 yakni "Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik" yang dilaksanakan oleh Inspektorat melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi, serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 yang telah disusun diharapkan dapat diimplementasikan serta dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Malinau yakni Meningkatkan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah serta Sasaran Strategis Inspektorat yakni Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja dan Meningkatnya Maturitas SPI OPD sehingga Inspektorat dapat berkontribusi dalam mewujudkan Kabupaten Malinau yang mandiri, Damai, dan Sejahtera didukung Pemerintah yang Profesional.



Malinau, 4 Februari 2022  
Plt. Inspektur,

**Dr. MUHAMMAD FITERIADY, S.STP.,M.Si**

Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19790829 199810 1 001